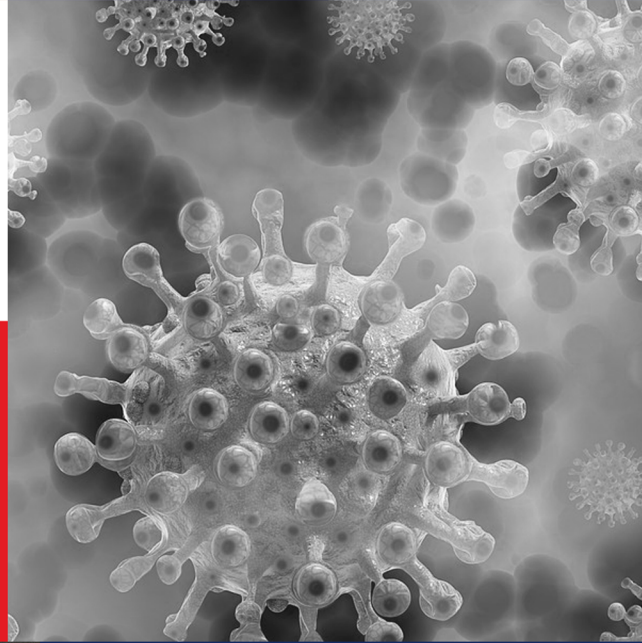




KELUHAN WARGA MENGENAI BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

Penulis:

Agus Sarwono, Amanda Tan, Firdaus Ferdiansyah,
Windyah Puji Lestari, dan Yemiko Happy Nandatama

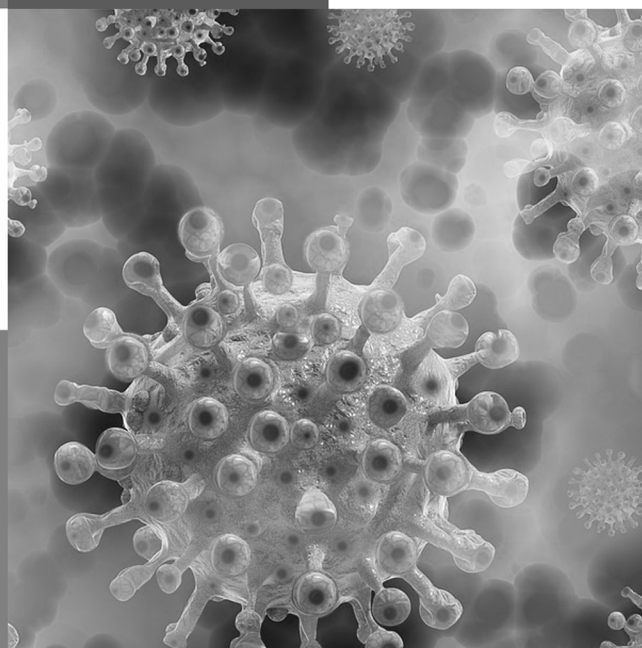
Editor:

Amanda Tan



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**
the global coalition against corruption



KELUHAN WARGA MENGENAI BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

Penulis:

Agus Sarwono, Amanda Tan, Firdaus Ferdiansyah,
Windyah Puji Lestari, dan Yemiko Happy Nandatama

Editor:

Amanda Tan



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

Indonesia
the global coalition against corruption

LAPORAN KELUHAN WARGA MENGENAI BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

Terbit pada:

Ditulis oleh Agus Sarwono, Amanda Tan, Firdaus Ferdiansyah, Windyah Puji Lestari, dan Yemiko Happy Nandatama

ISBN:

Editor: Amanda Tan

Desain dan tata letak: Firman Hendika

Dipublikasikan oleh Yayasan Warga Berdaya Untuk Kemanusiaan

Transparency International Indonesia

Merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia

Bona Indah Plaza A2-B11, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440

Email: sekretariat@laporcovid19.org

Jumlah halaman: 33 halaman

Tinggi dan lebar buku: A4 (21 x 29,7 cm)

Hak Cipta 2023 @ Yayasan Warga Berdaya Untuk Kemanusiaan, Transparency International Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar	1
Rekapitulasi laporan yang masuk ke kanal laporan LaporCovid-19 (WA Chatbot & Telegram)	4
Laporan masuk berdasarkan kanal yang digunakan	4
Laporan masuk berdasarkan waktu pelaporan	4
Laporan masuk berdasarkan sebaran provinsi	5
Jenis bantuan sosial yang paling banyak diajukan	6
JARING PENGAMAN SOSIAL	6
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	6
Pendataan	7
Tidak terdata (50%)	8
Potensi nepotisme (7,81%)	8
Salah sasaran (6,25%)	9
Pendistribusian/Penyaluran	9
Terdata namun tidak kunjung mendapatkan (12,5%)	10
Bantuan terhenti (10,94%)	10
Tidak dapat mengambil karena kendala administrasi (4,69%)	11
Bantuan Sembako	11
Pendistribusian/Penyaluran	13
Bantuan terhenti (10,94%)	13
Bantuan yang tidak kunjung didistribusikan (12,9%)	13
Pendataan (26%)	14
Minimnya Informasi (9%)	14
Kualitas Sembako (9%)	15
Bantuan Subsidi Upah	15
Pendistribusian	15
Terdata namun tidak menerima (46,67%)	16
Bantuan Terhenti (23,33%)	16
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	17
Pendataan (47%)	19
Tidak terdata (26,67%)	19
Salah sasaran (6,67%)	19
Potensi nepotisme (13,3%)	19
Pendistribusian (40%)	20
Terdata namun tidak kunjung mendapatkan (20%)	20
Bantuan terhenti (20%)	20
Kurang Informasi (13%)	20
Bantuan Sosial Jenis Lainnya	21

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	22
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	22
Temuan Transparency International Indonesia	22
Temuan LaporCovid-19	23
Pendataan	24
Tidak Terdata	25
Salah sasaran	25
Pungutan liar	25
Pendistribusian	26
Terdata namun tidak menerima	26
Tidak dapat mengambil	26
Kesimpulan	27
Rekomendasi	30

PENGANTAR

Pandemi yang berlangsung selama hampir setahun membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Sebagai upaya untuk dapat melangsungkan perputaran ekonomi di masyarakat, pemerintah merespon situasi pandemi dengan memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia. Bantuan material ini diberikan kepada rakyat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku UMKM.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan catatan kementerian keuangan sampai dengan akhir Desember, realisasi anggaran perlindungan sosial Rp. 220,9 triliun. Meskipun melebihi pagu anggaran, pelaksanaan program ini menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial karena berbagai permasalahan.

Selain program perlindungan sosial, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pun mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaku UMKM. Pada tahun 2020, sebanyak 12 Juta pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dalam bentuk hibah melalui skema program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Masing-masing pelaku usaha mendapatkan dana hibah yang di transfer langsung melalui Bank penyalur sebesar Rp 2.400.000 dengan total anggaran mencapai Rp 28,8 triliun. Dan pada tahun 2021, program ini akan dilanjutkan kembali meskipun sejauh ini data penerima beragam program bantuan UMKM sama gelapnya dengan informasi mendetail tentang realisasi program pemulihan ekonomi lainnya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi membuat distribusi bantuan sosial tidak berjalan mulus. Permasalahan pendataan menjadi salah satu penyebab banyaknya bantuan sosial yang tidak tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu. Sebagaimana diketahui bahwa, Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan adalah basis data lama dan tidak diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini yang mengakibatkan, pendistribusian bantuan sosial selama ini mengalami banyak masalah.

Selain persoalan pendataan, beberapa permasalahan lain yang ditemukan adalah penerima bantuan fiktif, kualitas bantuan, politisasi bantuan sosial, hingga praktik pungli yang dilakukan oleh oknum/kelompok tertentu.

Sejak beroperasi pada bulan Agustus 2020, layanan laporan warga LaporCovid-19, berkolaborasi dengan Transparency International Indonesia (TII), menerima 263 laporan bantuan sosial, 201 diantaranya adalah laporan terverifikasi yang sudah dan sedang dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

AJAKAN UNTUK MENGAWAL BANSOS PADA PLATFORM SOSIAL MEDIA LAPORCOVID-19

Kenapa Distribusi Jaring Pengaman Sosial (Bansos) Wajib Dikawal?



<http://rs.harianmelayu.com/berita/2020/04/bansos-tanpa-pas-pas-bansos-covid-19>

lapor covid-19

Mengapa Distribusi Jaring Pengaman Sosial (Bansos) Wajib Dikawal?

- 1 Alokasi APBN untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9T.
- 2 Setiap provinsi, kabupaten dan kota juga mengalokasikan APBD untuk perlindungan sosial, besarnya berbeda-beda di tiap wilayah.
- 3 Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, juga mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa.
- 4 DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola Kemensos tidak diupdate secara rutin dan akurat.
- 5 Program ini sangat populer dan "fresh money" yang rawan terjadi penyimpangan.

lapor covid-19

Potensi masalah dalam distribusi bansos:

- Pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako
- Adanya gelombang kelompok rentan baru, menyusul PHK dan kebijakan pembatasan sosial
- Distribusi tidak merata
- Politisasi bansos apa lagi masa pilkada
- Pemotongan/pungli
- Pemberian fiktif
- Pemberian double



<https://freepik.com>

lapor covid-19

Jika anda mengetahui adanya penyalahgunaan distribusi bansos, laporkan:

1. Hubungi
wa.me/6281293149546
t.me/laporcovid19bot
2. Sapa bot
3. Pilih menu No. 4
4. Siapkan share lokasi penyalahgunaan
5. Siapkan foto sebagai bukti validasi
6. Laporkan kejadian selengkapnya (NIK, dan alamat lengkap) agar kami bisa menyampaikan ke dinas terkait

*laporan yang sudah disampaikan ke dinas terkait akan diberitahukan ke pelapor



lapor covid-19

MATERI EDUKASI DAN INFORMASI BANTUAN SOSIAL YANG DIPUBLIKASI DI PLATFORM SOSIAL MEDIA LAPORCOVID-19



PENYALURAN BANSOS BELUM ADIL DAN MERATA

Sejak beberapa bulan lalu, pemerintah telah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bansos yang diberikan itu diharapkan bisa membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pandemi. Namun, berbulan-bulan setelah bansos itu mulai disalurkan, berbagai masalah tetap muncul.

Lapor Covid-19

laporcovid19.org

Lapor Covid-19

Selama periode 8-15 Desember 2020, LaporCovid19 menerima 38 keluhan dari warga di berbagai daerah mengenai bansos yang disalurkan pemerintah. Sebagian besar keluhan itu berkaitan dengan penyaluran bansos yang dinilai belum adil dan belum merata.

Dalam laporan yang disampaikan kepada LaporCovid19, **sejumlah warga mengaku sangat membutuhkan bansos karena perekonomian mereka bermasalah akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, hingga sekarang, mereka mengaku belum mendapat bansos yang sangat dibutuhkan itu.** Padahal, pandemi sudah berlangsung sembilan bulan lebih sehingga banyak warga yang telah mengalami kesulitan ekonomi cukup lama.

laporcovid19.org

Kasus Laporan: Belum Menerima Bansos

Nama saya _____ beralamatkan di dusun tepo, desa dilimas, kecamatan tegalrejo, kabupaten magelang, sejak awal pandemi corona, saya tidak pernah mendapat dana bansos tunai, padahal saya salah satu warga yang terdampak corona, sejak corona, saya kehilangan mata pencaharian sebagai tour leader. Tapi tidak ada dana bantuan dari pemerintah ke saya. Terima kasih Harapan saya, keluarga saya mendapat bantuan dana sosial tunai dari pemerintah agar dapat mencukupi kebutuhan sehari hari

Laporan warga dari Magelang, Jawa Tengah
8 Desember 2020

Saya saya adalah warga desa gandrungmanis, kecamatan Gandrungmangu, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Selama masa pandemi ini keluarga saya yang tidak menerima bantuan sosial baik itu bantuan sembako maupun BST Yang katanya diperuntukan untuk warga negara Indonesia yang terdampak covid 19 dan penghasilan keluarga saya juga dibawah 5 juta/bulan Tadinya saya mengeluhkan ini ke pihak desa namun mereka beralih ini sudah dari sananya, desa hanya menyalurkan saya Mohon kebijakannya Terimakasih sebelumnya

Laporan warga dari Cilacap, Jawa Tengah
10 Desember 2020

laporcovid19.org

Kasus Laporan: Masalah Pendataan Penerima Bansos

Saya adalah seorang single parent, Saya seorang pedagang kecil-kecilan yang tidak bekerja selama pandemi ini. Saya sangat membutuhkan suntikan dana untuk memulai usaha saya kembali. Apalagi saya juga harus membiayai keperluan sekolah kedua anak saya yang sekarang sudah menginjak pertengahan SMA. Saya memang sudah didata untuk diajukan menjadi penerima UMKM, Tapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Padahal mereka (Para pedagang yang sudah cukup mampu dalam segi ekonomi) telah mendapatkan bantuan UMKM sejak lama. Mohon maaf mungkin banyak bantuan yang tidak tepat sasaran di sini. Terimakasih.

Laporan warga dari Trenggalek, Jawa Timur
8 Desember 2020

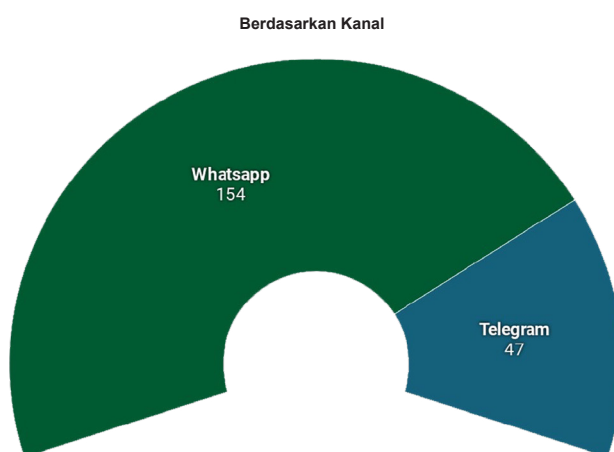
Saya salah satu warga yang belum menerima bantuan sosial sampai sekarang, padahal saya sudah mengumpulkan data 2 ke rt/rw dan kondisi sekarang sedang tidak bekerja karena dirumah kan.

Laporan warga dari Tasikmalaya, Jawa Barat
10 Desember 2020

laporcovid19.org

REKAPITULASI LAPORAN YANG MASUK KE KANAL LAPORAN LAPORCOVID19 (WA CHATBOT & TELEGRAM):

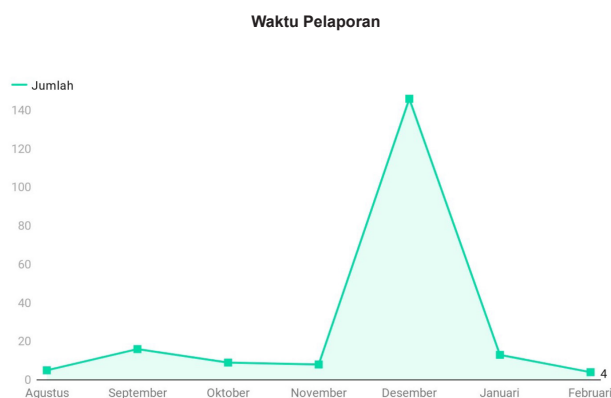
1. LAPORAN MASUK BERDASARKAN KANAL YANG DIGUNAKAN:



Source: LaporCovid-19

Layanan laporan warga LaporCovid-19 dan Transparency International Indonesia (TII) menyediakan dua *platform* untuk warga melapor, yaitu melalui WhatsApp Chatbot dan Telegram Bot. Warga yang melapor masalah bantuan sosial lebih banyak menggunakan layanan WhatsApp Chatbot (154 warga), daripada aplikasi Telegram. Hanya 47 warga yang menggunakan aplikasi Telegram untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi mengenai bantuan sosial. Hal ini sangat dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak mengenal dan menggunakan WhatsApp daripada Telegram.

2. LAPORAN MASUK BERDASARKAN WAKTU PELAPORAN:



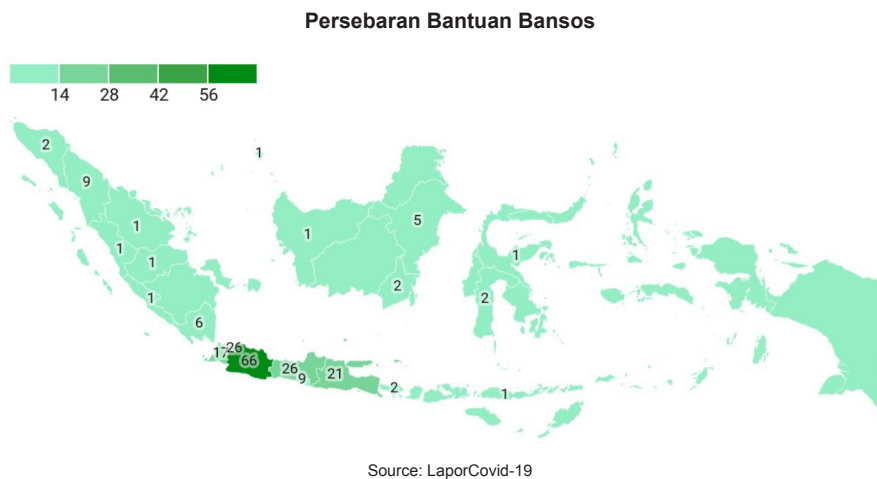
Source: LaporCovid-19

Sebetulnya, aduan mengenai bantuan sosial sudah diterima oleh Tim Lapor Warga LaporCovid-19 sejak bulan Agustus 2020. Seiring berjalannya waktu, aduan yang masuk mengenai bantuan sosial cukup fluktuatif.

Berdasarkan jumlah laporan yang masuk, keluhan mengenai bantuan sosial menjadi salah satu yang cukup dominan terutama pada bulan Desember 2020 lalu atau setidaknya tepat saat penangkapan Menteri Sosial RI kala itu atas kasus korupsi pengadaan bantuan sosial selama masa pandemi. Terdapat lonjakan laporan yang sangat signifikan pada tanggal 6 Desember 2020, bertepatan dengan penangkapan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Kejadian tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengawal proses penyelenggaraan bantuan sosial hingga benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

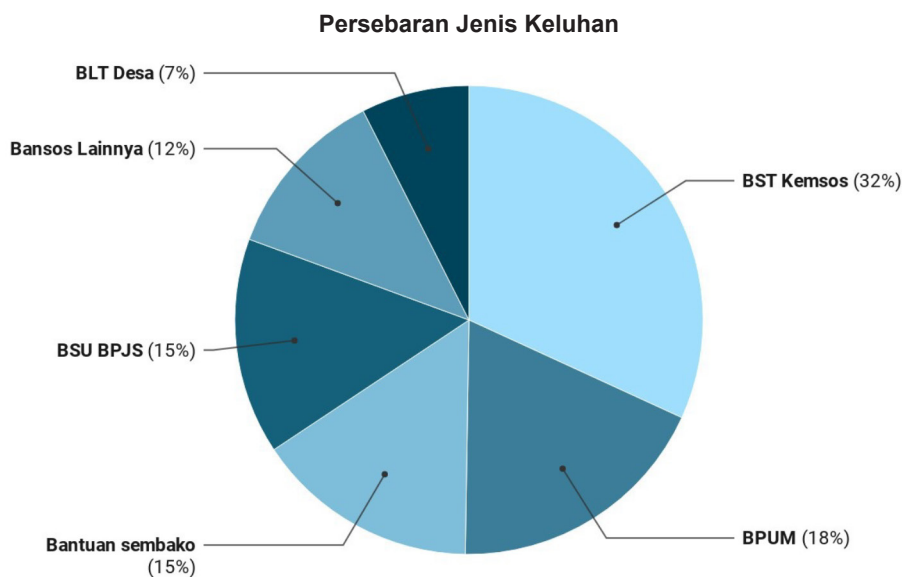
3. LAPORAN MASUK BERDASARKAN SEBARAN PROVINSI:



Berdasarkan pemetaan wilayahnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta menjadi provinsi dengan keluhan bansos terbanyak. Diikuti dengan Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, DIY dan berbagai provinsi lainnya. Total seluruhnya mencapai 197 aduan yang tersebar pada beberapa provinsi di Indonesia.

Kami melihat bahwa persoalan bansos tidak hanya terjadi pada 3 daerah dengan keluhan terbanyak atau daerah lain yang kami terima. Akses informasi kami dengan warga dan juga sosialisasi dari pemerintah tentang bantuan sosial yang tidak diselenggarakan dengan baik menjadi alasan mengapa tidak ada keluhan dari daerah diluar dari yang kami terima.

4. JENIS BANTUAN SOSIAL YANG PALING BANYAK DIADUKAN:



Source: LaporCovid-19

Apabila dirincikan, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp. 300.000,00 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial adalah bantuan sosial yang paling banyak diadukan oleh warga. 64 laporan yang masuk ke kanal aduan terkait dengan keluhan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain BST Kementerian sosial, laporan terbanyak kedua adalah Bantuan Sembako, sebanyak 31 laporan. Warga banyak mengeluhkan terkait dengan kualitas dan pendistribusian bantuan sembako oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

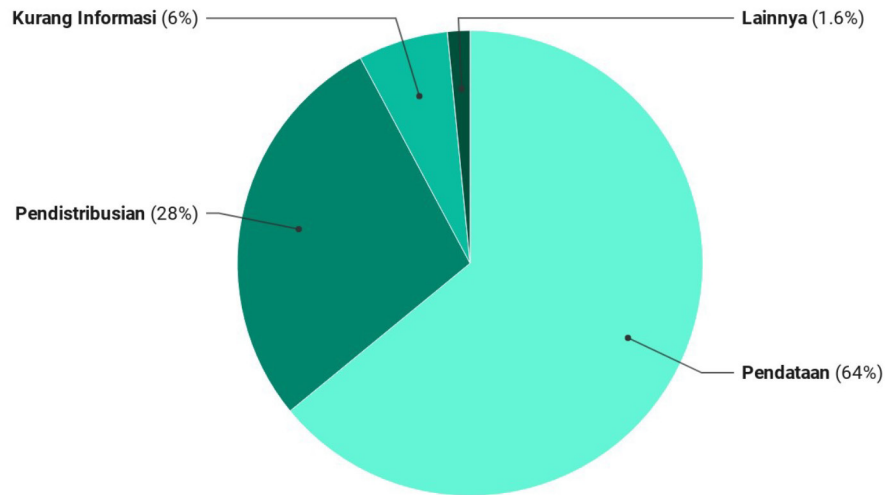
JARING PENGAMAN SOSIAL

1. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 300.000,00 diberikan oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penerima manfaat terdaftar dalam pendataan di tingkat RT/RW yang dilakukan oleh otoritas setempat. Bagi mereka yang tidak terdaftar dapat menginformasikan kepada aparat desa. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa masih banyak warga yang tidak terdata walau sudah melaporkan kepada RT/RW.

JENIS ADUAN/ PERMASALAHAN TERKAIT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) YANG DIALAMI OLEH WARGA:

Permasalahan Utama pada BST Kemsos



Source: LaporCovid-19

Permasalahan Utama pada BST Kemsos



Source: LaporCovid-19

A. PENDATAAN

Kesulitan warga untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial disebabkan oleh permasalahan pendataan yang kacau oleh pemerintah pusat maupun daerah (64%).

Berdasarkan keluhan warga, kami mengkategorisasikan permasalahan pendataan ke dalam beberapa sub-masalah yang tercantum pada grafik dibawah:

- Tidak terdata oleh pihak pengusul bantuan sosial (50%)
- Bantuan salah sasaran (6,25%)
- Terdata namun tidak menerima (12,5%)
- Potensi nepotisme yang dilakukan oleh pihak pengusul (7,81%)

- **Tidak terdata (50%):**

Masyarakat yang tidak terdata oleh pihak pengusul sama sekali tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai yang diharapkan, padahal mereka termasuk ke dalam kategori penerima (terdampak Covid-19 dan kehilangan pekerjaan), namun tidak kunjung terdata sehingga tidak menerima bantuan sosial tersebut. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa ketika mendaftarkan diri kepada pihak RT/RW, warga cenderung diabaikan.

“Sejak awal pandemi Covid-19, saya tidak pernah mendapat dana bansos tunai, padahal saya salah satu warga yang terdampak corona, sejak corona, saya kehilangan mata pencaharian sebagai tour leader. Tapi tidak ada dana bantuan dari pemerintah ke saya”

Magelang, 8 Desember 2020.

“Selama pandemi covid saya belum menerima bantuan, padahal saya dan istri sudah di phk di tempat kerja”

Sleman, 17 Desember 2020.

“Keluhan saya adalah pendataan yang tidak merata. Saya sudah meminta surat dari pihak RT, namun tidak ditanggapi”

Bekasi, 8 Desember 2020.

- **Potensi nepotisme (7,81%)**

Proses pendataan yang kacau dan minim transparansi menimbulkan adanya praktik nepotisme yang dilakukan oleh pihak pengusul. Hal ini terjadi karena pihak pengusul dapat secara semena-mena mencantumkan nama-nama tertentu sebagai penerima bantuan sosial. Beberapa laporan yang kami terima menunjukkan bahwa pihak RT/RW mengusulkan kerabat dan saudara terdekatnya sebagai penerima bantuan sosial.

“Keluarga saya selama pandemi ini baru mendapatkan BANSOS berupa uang sebesar 300.000 saja sedangkan tetangga saya sudah menerima lebih dari itu bahkan sampai sekarang ada yang belum menerima bantuan sosial, di wilayah saya pendataan tidak dilakukan secara mendetail, dan penyaluran Bansos tidak merata hanya mementingkan keluarga dekat para pejabatnya saja.”

Subang, 4 Desember 2020

“Apakah bantuan sosial covid-19 dari pemerintah tidak merata? apakah hanya dipilih beberapa? Keluarga kami belum pernah mendapat bantuan berupa uang maupun sembako. Saat kami bertanya-tanya, ada yang bilang ini dari atasan sudah dipilih, sedang tetangga saya mendapatkan 2 bantuan sekaligus. Lalu apakah ada kriteria khusus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah?, kami juga berasal dari keluarga sederhana”

Nganjuk, 5 Desember 2020

- **Salah sasaran (6,25%)**

Beberapa warga juga mengeluhkan adanya bantuan sosial yang salah sasaran atau disalurkan kepada pihak yang seharusnya tidak menerima karena tidak tercakup sebagai kategori penerima bantuan sosial. Penyebab terbesar dari adanya insiden ini adalah tidak adanya tindakan dari pihak pengusul untuk melakukan verifikasi faktual warga calon penerima bantuan. Verifikasi faktual dan validasi data di lapangan melibatkan pihak otoritas (pihak RT/RW) mendatangi rumah warga yang telah didata sebagai penerima untuk memeriksa kondisi ekonomi mereka. Namun, menurut laporan warga yang masuk ke kanal kami, warga mengeluhkan banyaknya bantuan yang diterima oleh keluarga yang cukup mampu secara finansial:

“Selama pandemi ini saya hanya dapat 2 kali bansos, setelah itu bansos turun tapi saya tidak dapat... banyak sekali orang disekitar saya yang tidak dapat bansos, padahal mereka benar2 membutuhkan. Realita di lapangan banyak warga mampu yang ternyata dapat bansos.”

Kota Bekasi, 7 Desember 2020

“Pak RT 01nya tidak bijaksana dalam pendataan baksos, yg pekerja Unilever (gaji di atas UMR) saudaranya sendiri didata untuk mendapat bantuan, sedangkan yg tidak bekerja tidak diprioritaskan. Mohon bantuan, bahkan yang harusnya bantuan ada dari 2017 belum turun turun data bansos dan tidak diurus oleh Pak RTnya, malah Pak RWnya yg sibuk mengurus sekarang, tapi belum ada tindak lanjut, dan pihak kelurahan memberi saran harusnya RT yang aktif. Mohon, agar hal ini diperbaiki sehingga tidak ada lagi kejadian yang seharusnya tidak dapat malah dapat dan diberikan kepada yang pantas mendapatkan.”

Kota Bogor, 5 September 2020

B. PENDISTRIBUSIAN/PENYALURAN

Selain permasalahan pendataan, permasalahan juga terlihat pada saat proses distribusi. Saat ditelusuri, terdapat berbagai macam celah yang menghambat distribusi tidak berjalan lancar. Salah satu yang cukup membahayakan ialah tata kelola data yang belum diperbaharui, karena munculnya gelombang kelompok rentan ekonomi baru menyusul trend PHK dan juga kebijakan pembatasan sosial

Kami mengkategorikan persoalan distribusi ke dalam beberapa sub-masalah:

- Terdata sebagai penerima namun tidak kunjung mendapatkan (12,5%)
- Bantuan terhenti (10.94%)
- Tidak dapat mengambil karena kendala administrasi (4,69%)

Permasalahan pada BST Kemsos



Source: LaporCovid-19

- **Terdata namun tidak kunjung mendapatkan (12,5%)**

Banyak warga mengadu bahwa mereka sudah terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai penerima bansos, namun tidak kunjung menerima bantuan tersebut.

Dari laporan yang masuk, terlihat bahwa warga tidak mengetahui alasan mengapa bantuan sosial tidak didapatkan. Mereka tidak mendapatkan informasi sejauh mana proses distribusi telah dilaksanakan. Artinya, penyaluran distribusi sangat tidak transparan dan pemerintah, sebagai lembaga bertanggung jawab atas penyaluran, tidak memegang prinsip akuntabilitas.

“Saya mengecek di <https://pikobar.jabarprov.go.id/> nama saya terdaftar penerima bansos dan sudah dua kali tapi saya belum menerima nya”

Bogor, 24 Oktober 2020

“Sudah sekitar bulan april di data mendapatkan bantuan sosial langsung tunai tapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai pencairan. Padahal di tempat lain sudah banyak yang cair. Mohon diklarifikasi. Bantuan merata atau hanya orang-orang yang terpilih saja?”

Kota Malang, 6 Desember 2020

- **Tidak dapat mengambil karena kendala administrasi (4,69%)**

Warga juga mengeluhkan sulitnya mengambil bantuan sosial, padahal sudah membawa bukti administrasi yang dibutuhkan. Ini menunjukkan sistem birokrasi yang masih berbelit-

belit pada struktur penyaluran bantuan sosial di tengah krisis akibat pandemi.

“Mohon untuk pembagian bansos agar [sistemnya] diperbaiki lagi, jangan setiap kali mau pembagian dimintakan trus fotocopy KK n KTP. Hanya cukup sekali saja di awal foto copy KK dan KTP, karena [saya] menjadi bingung setiap kali mau pembagian selalu dimintakan fotocopy KK dan KTP tersebut”

DKI Jakarta, 11 September 2020

- **Bantuan terhenti (10,94%)**

Beberapa warga juga menunggu kedatangan bansos periode berikutnya, karena mereka sudah mendapatkan pada saat periode-periode pertama. Seperti permasalahan pada proses distribusi yang macet karena pendataan yang kacau, warga tidak mengetahui alasan mengapa bantuan terhenti. Di dalam laporannya, warga cenderung bertanya kapan bantuan berikutnya akan dicairkan atau meminta pertolongan supaya mereka kembali menjadi penerima manfaat. Warga meminta tolong menunjukkan informasi mengenai penjadwalan penyaluran bantuan sosial tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh masyarakat.

“Sampai sekarang saya belum dapat dana bantuan blt tahap ke- 2 , padahal di tahap 1 nya saya dapat di awal bulan, tolong ditindaklanjuti, mengingat sulitnya ekonomi di masa pandemi ini ,mohon pengertiannya.”

Kota Bekasi, 7 Desember 2020

“Apakah saya termasuk kedalam penerima bantuan? Karna pada periode pertama saya mendapat bantuan, tetapi periode kedua kali ini saya tidak mendapatkannya.”

Kota Bandung, 10 Desember 2020

- **Tidak dapat mengambil karena kendala administrasi (4,69%)**

Warga juga mengeluhkan sulitnya mengambil bantuan sosial, padahal sudah membawa bukti administrasi yang dibutuhkan. Ini menunjukkan sistem birokrasi yang masih berbelit-belit pada struktur penyaluran bantuan sosial di tengah krisis akibat pandemi.

“Mohon untuk pembagian bansos agar [sistemnya] diperbaiki lagi, jangan setiap kali mau pembagian dimintakan trus fotocopy KK n KTP. Hanya cukup sekali saja di awal foto copy KK dan KTP, karena [saya] menjadi bingung setiap kali mau pembagian selalu dimintakan fotocopy KK dan KTP tersebut”

DKI Jakarta, 11 September 2020

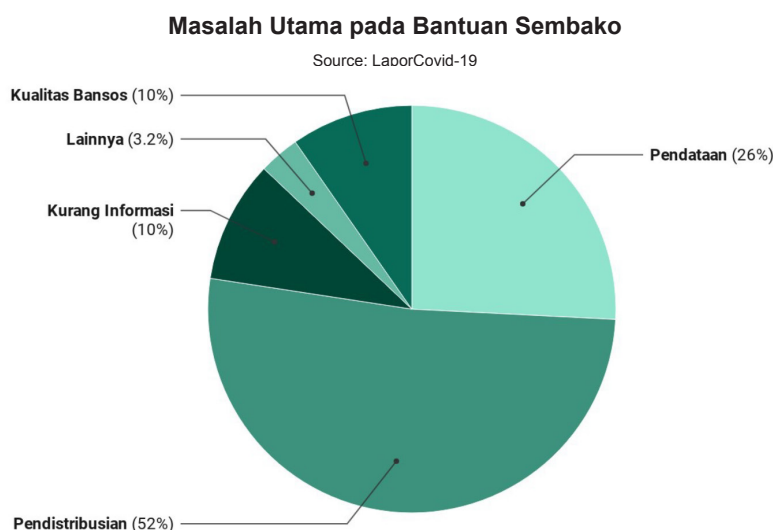
2. BANTUAN SEMBAKO

Untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mendistribusikan sejumlah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-

tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat program Sembako yang namanya terdaftar di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang bersumber pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Bantuan Sembako ini juga memungkinkan KPM mendapatkan variasi konsumsi serta gizi yang cukup.

Meskipun demikian, pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas dan optimalisasi manfaat program bagi KPM. Laporan mengenai Bantuan Sembako berjumlah 31 total aduan yang berfokus pada pendistribusian sebanyak 16 laporan (52%), pendataan sebanyak 8 laporan (26%) dan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai bantuan sosial itu sendiri (13%). Di samping itu, ada juga masalah lain berkenaan dengan kualitas bansos itu sendiri.

JENIS ADUAN/ PERMASALAHAN TERKAIT BANTUAN SEMBAKO YANG DIALAMI OLEH WARGA:



Meski Kementerian Sosial telah menetapkan KPM tambahan atau perluasan dari PKH dan Program Sembako, namun masih ditemukan penerima yang tidak layak maupun keluarga miskin yang tidak menjadi penerima. Hal ini mengindikasikan bahwa keabsahan data atau tidak mutakhirnya sumber data, sementara verifikasi dan validasi cenderung dilakukan untuk kepentingan administrasi. Besarnya alokasi anggaran dan juga minimnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan menjadi celah timbulnya masalah yang berdampak pada warga secara langsung. Ini sejalan dengan aduan yang kami terima, mengenai proses pendistribusian yang bermasalah menjadi aduan paling dominan (16 laporan atau 52%) pada program Sembako ini.



Source: LaporCovid-19

1. Pendistribusian/Penyaluran (52%):

- Bantuan yang terhenti atau pendistribusian yang tidak sesuai termin (32%)**

Pengeluaran keluarga yang semestinya bisa ditekan karena dianulir dengan adanya bantuan sosial, menjadi naik kembali karena warga tidak kunjung mendapatkan bantuan yang semestinya ia dapatkan sebelumnya. Penghentian yang tidak disertai alasan yang jelas akan membuat warga bertanya-tanya.

“Ibu saya hanya menerima BANSOS [bantuan sembako] 4 kali. Setelahnya hingga sampai sekarang tidak pernah dapat lagi”

Kota Depok, 04 Desember 2020

- Bantuan yang tidak kunjung didistribusikan padahal warga sudah terdaftar sebagai penerima. (12,9%)**

Masalah lain seperti tidak mendapatkan bantuan tersebut meski sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan ke perangkat desa juga muncul dalam laporan kami. Integritas data PKH dan Program

Sembako terbukti belum sepenuhnya optimal sehingga ada penerima PKH yang tidak menerima Program Sembako. Ketidadaan unit penanganan pengaduan bantuan sosial menyebabkan laporan masyarakat tidak ditanggapi, atau respon yang diberikan tidak begitu jelas dan cenderung membingungkan sehingga proses penyelesaian masalah tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Keluarga saya tidak mendapatkan BANSOS. padahal sudah di data oleh aparat setempat.”

Kabupaten Bandung, 07 Desember 2021

2. Pendataan (26%):

Persoalan pendataan juga masih menjadi aduan yang cukup banyak dengan 8 laporan (26%) yang artinya kesiapan infrastruktur data KPM belum berjalan secara optimal. Hambatan ini menjadi lebih berbahaya apabila pemerintah daerah tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka tidak ada pembaharuan dalam data tersebut. Padahal banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga terutama dalam kondisi krisis seperti ini dengan tren PHK dan juga pembatasan sosial di lingkungan sekitar.

Idealnya, verifikasi dan validasi dilakukan sebelum tahap penentuan KPM dengan melalui proses data cleansing serta pembukaan rekening kolektif di bank penyalur, dan pencetakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Namun pada verifikasi dan validasi data KPM perluasan tidak dilakukan sebagaimana biasanya, bervariasi, atau bahkan terlambat. Berikut adalah beberapa laporan yang menggambarkan persoalan pendataan:

“Selamat malam, saya belum pernah mendapat bantuan berbentuk apapun [termasuk bantuan sembako] semenjak ada pandemi Covid-19 Terimakasih”

Kabupaten Cirebon, 07 Desember 2021

*“Saya Defira ***** Dari sejak Covid-19 masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada pendataan dan saya belum menerima bantuan berupa sembako apapun. Terimakasih”*

Kota Jakarta Timur, 05 Desember 2020

3. Minimnya Informasi (9%)

Selain itu, kami juga menerima aduan mengenai minimnya informasi yang disampaikan kepada warga membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dan sejauh mana proses distribusi bantuan sembako ini. Memang, informasi yang diterima sebagian besar KPM masih parsial. Warga tidak mengetahui besaran nilai bantuan yang seharusnya diterima dan jangka waktu penyalurannya. Informasi yang disampaikan cukup terbatas dan hanya mengandalkan aplikasi pesan instan, padahal tidak semua KPM memiliki akses terhadap teknologi dan memiliki kendala jaringan di tempat terpencil. Berikut merupakan salah satu contoh laporan yang masuk :

“Sebetulnya apakah memang bantuan sosial Covid-19 dari pemerintah hanya dipilih beberapa saja? Keluarga kami belum pernah mendapat bantuan berupa uang maupun sembako. Saat kami bertanya-tanya, ada yang bilang ini dari atasan sudah dipilih, sedang di depan rumah saya dalam satu keluarga dapat mendapatkan 2 bantuan sekaligus. Lalu apakah ada kriteria khusus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kami juga termasuk keluarga yang survive di pandemi ini”

Kabupaten Nganjuk, 21 Desember 2020

4. Kualitas Sembako (9%)

Aduan lain yang kami terima yakni mengenai kualitas daripada bantuan sembako itu sendiri. Warga mengeluhkan kualitas bantuan yang mereka terima cukup buruk dengan kondisi beras yang memiliki banyak kutu. Pemantauan kuantitas/kualitas barang menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah beserta dengan penyalur agar menetapkan pemasok yang berada di tingkat daerah untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditetapkan.

“Beras dari bansos tidak layak konsumsi, banyak kutunya.”

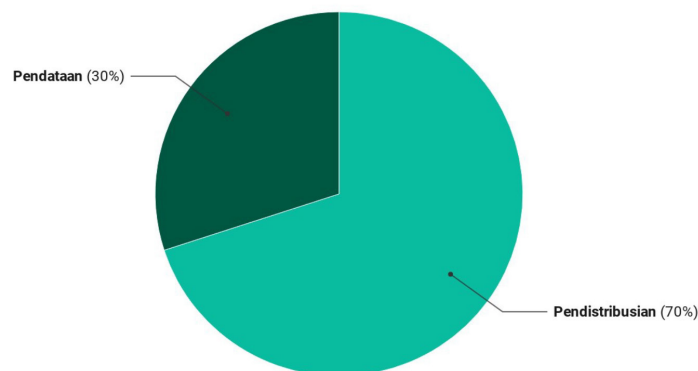
Kota Jakarta Selatan, 15 September 2020

3. BANTUAN SUBSIDI UPAH

Program bantuan subsidi upah (BSU) ini merupakan bantuan bagi pekerja/buruh yang terdampak Covid-19, khususnya pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah Rp5 juta. Program ini dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan supply data. Nantinya, bantuan akan diberikan secara langsung kepada pekerja/buruh yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan subsidi ini. Penyalurannya secara non tunai melalui Bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Berikut jenis aduan/ permasalahan terkait BSU yang dialami oleh warga:

Permasalahan Utama pada BSU BPJS



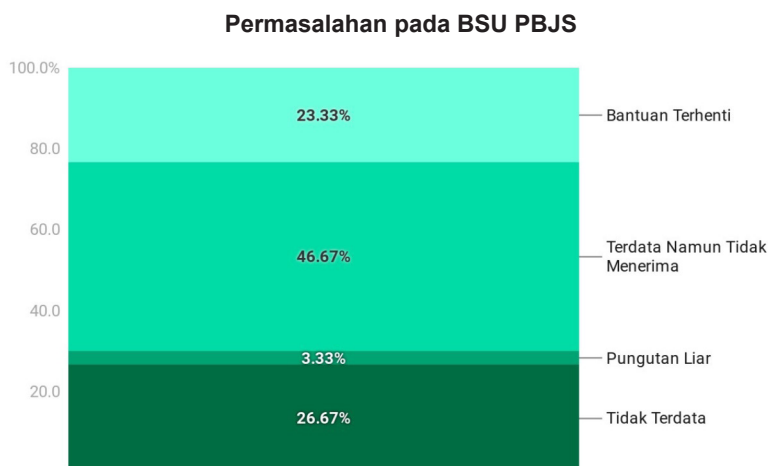
Source: LaporCovid-19

1. Pendistribusian

Berdasarkan laporan yang masuk, permasalahan pada penyaluran dana BSU BPJS kepada karyawan dengan gaji dibawah 5 juta yang juga peserta aktif iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan (70%).

Apabila dirincikan, bentuk permasalahan penyaluran bantuan upah terbagi kedalam beberapa jenis:

- Terdata namun tidak menerima (46,67%)
- Bantuan terhenti (23,33%)



Source: LaporCovid-19

- **Terdata namun tidak menerima (46,67%):**

Karyawan yang telah melakukan iuran BPJS Tenaga Kesehatan secara berkala dan bergaji dibawah 5 juta terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Namun, laporan yang kami terima menunjukkan bahwa beberapa karyawan sama sekali tidak menerima, padahal mereka telah menghubungi pihak HRD untuk memastikan pendataan:

“Saya salah satu karyawan pabrik yang berlokasi di Jepara. Selama masa pandemi dari pemerintah meluncurkan bantuan sosial upah (BSU) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun dari belasan ribu karyawan masih ada beberapa yang belum mendapat bantuan, padahal memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dari pihak HRD dan kantor BPJS tidak memberikan kejelasan untuk karyawan yang belum mendapat.”

Jepara, 16 Desember 2020.

“Menurut informasi HRD kami, semua staf yang gajinya dibawah 5jt sudah disetorkan datanya dan di upload namun hingga saat ini tidak semua staff menerima dana tersebut apakah bisa dijelaskan pak rekan rekan saya sampai saat ini banyak yang belum menerima.”

Kota Surabaya, Desember 2020

- **Bantuan Terhenti (23,33%)**

Karyawan yang sudah mendapatkan pada periode 1 melaporkan bahwa pada periode berikutnya, mereka tidak mendapatkan. Di dalam narasi laporannya, pelapor juga cenderung meminta kepastian kapan dana periode kedua akan dicairkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak membuka informasi penjadwalan penyaluran BSU BPJS secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, mengakibatkan banyak

karyawan tidak tahu apakah bantuan berikutnya akan diberikan.

“Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan tahap pertama sudah diterima namun tahap kedua belum diterima hingga sekarang. Mohon bantuannya.”

Kota Surabaya, 5 Desember 2020

“Dana BLT BPJS tahap kedua saya belum cair sudah hampir 1 bulan ,sedangkan rekan saya sudah semua”

Kota Bogor, 6 Desember 2020

4. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Perkembangan BLT-Dana Desa sendiri rawan terjadi beberapa penyalahgunaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tidak tepat sasaran, menciptakan peluang korupsi, hingga menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat. Sayangnya, persoalan tersebut terjadi kembali di Tahun 2020 dimana kami mendapatkan beberapa aduan dari warga mengenai persoalan BLT Dana Desa yang bermasalah. Disamping itu, ketiadaan unit penanganan pengaduan BLT Dana Desa yang kemudian menyebabkan laporan masyarakat tidak ditanggapi, atau respon yang diberikan tidak jelas dan cenderung membingungkan sehingga proses penyelesaian masalah tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

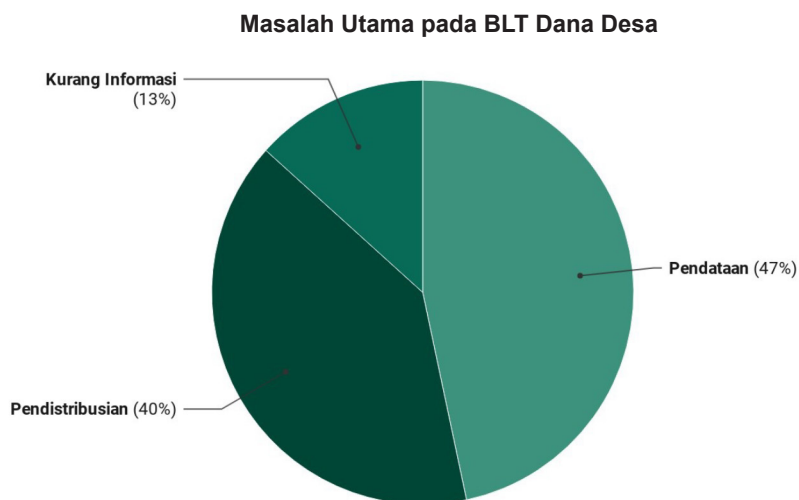
Minimnya partisipasi masyarakat dan pihak lain juga menjadi sasaran proses pendistribusian bantuan sosial rentan terjadi maladministrasi. Pada tingkat pertama misalnya, hal yang perlu didorong menangani aduan masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tugas mereka sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa. Hal ini juga diperparah adanya potensi nepotisme yang menguntungkan perangkat desa atau kerabat yang menjadi orang terdekat dari perangkat desa tersebut.

Masalah lain seperti tidak mendapatkan bantuan tersebut meski sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan ke perangkat desa. Begitu juga dengan komposisi pendistribusian yang memiliki masalah seperti salah sasaran dan juga penghentian penyaluran bantuan yang mestinya cukup dibutuhkan oleh warga.

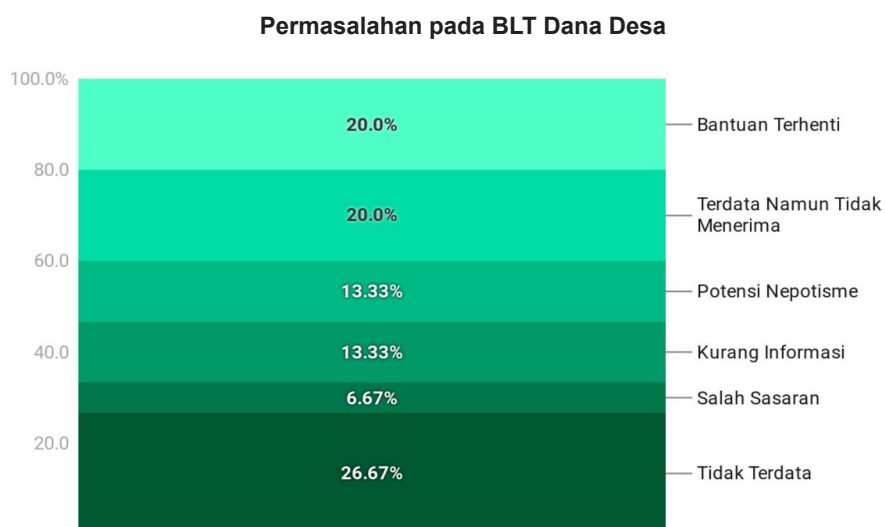
JENIS ADUAN/ PERMASALAHAN TERKAIT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA YANG DIALAMI OLEH WARGA:

Laporan mengenai BLT Dana Desa berjumlah 15 total aduan yang berfokus pada pendataan

sebanyak 7 laporan (47%), pendistribusian sebanyak 6 laporan (40%) dan juga kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai bantuan sosial itu sendiri (13%).



Source: LaporCovid-19



Source: LaporCovid-19

Dengan total 15 aduan, **masalah utama pada program BLT Dana Desa juga terletak pada pendataan (47%) dan pendistribusian (40%) yang tidak jauh berbeda dengan persoalan bantuan sosial lainnya.**

Pendataan meliputi masalah:

- Tidak terdaftar sebagai penerima (26%)
- Salah sasaran (6%)
- Adanya potensi nepotisme (13%)

Sedangkan pendistribusian meliputi:

- Terdata namun tidak kunjung menerima (20%)

- Bantuan yang diterima justru terhenti (20%)

1. Pendataan (47%)

- Tidak terdata (26,67%)

Proses pendataan yang tidak terbuka sarat terjadi penyimpangan prosedur dalam menentukan calon penerima manfaat bantuan tersebut. Ini memungkinkan terjadinya kriteria yang tidak tepat, pendataan yang tidak menyeluruh, rentan terhadap nepotisme, hingga integritas petugas dan data yang digunakan diragukan keabsahannya. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

*“Saya atas nama Alit *****, datanya tidak masuk di pemerintah [yang juga tidak mendapatkan bantuan]”*

Kabupaten Cirebon, 18 Oktober 2020

- Salah sasaran (6,67%)

Pendataan yang buruk juga menyebabkan potensi maladministrasi lain seperti penerima BLT-Dana Desa juga menerima jenis bantuan sosial lain dari pemerintah, penerima bukan termasuk kelompok masyarakat terdampak kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, atau penerima tidak sesuai kriteria yang artinya kondisi penerima dalam keadaan sehat dan mampu. Kesadaran masyarakat tentu menjadi hal yang patut diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah ketidaktepatan sasaran selain daripada kesadaran penyelenggara itu sendiri. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

“Jadi di desa saya itu sedikit tidak transparan min. Keluarga saya, ibu janda anak tunggal, . Kerja sbg buruh. Selama pandemi ini, baru dapat bantuan yg 200 rb itu 2x . Padahal yg lebih mampu dapat bantuan yg 600rb dari desa atau kemensos”

Kabupaten Magelang, 14 Oktober 2020

- Potensi nepotisme (13,3%)

Perilaku nepotisme masih menjadi momok tersendiri apabila perangkat desa atau RT/RW mencantumkan keluarga atau kerabat mereka sebagai penerima walaupun semestinya tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, atau setidaknya tidak terlalu membutuhkan. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

“Saya ingin menyampaikan mengapa bantuan Covid19 itu yang mendapatkan bantuan hanya kerabat perangkat daerah atau perangkat desa saja? Tolong ditindak lanjuti. Banyak sekali di setiap desa yang mengalami hal seperti ini yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan hak nya begitu juga sebaliknya”

Kota Jakarta Utara, 11 Desember 2020

2. Pendistribusian (40%):

- **Terdata namun tidak kunjung mendapatkan (20%)**

Idealnya, data yang solid dan telah dilakukan verifikasi dan validasi secara faktual akan memudahkan petugas dan masyarakat memantau sejauh mana proses pendistribusian bantuan sosial. Namun demikian, pemerintah daerah juga dirasa belum cukup aktif dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Ini menyebabkan keabsahan data dan integritas petugas/penyalur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan kendala selama proses pendistribusian. Seperti halnya pada keluarga/calon penerima yang sudah didaftarkan namun tidak kunjung mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

“Selama ini keluarga saya belum pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah, keluarga saya tidak ada penghasilan sama sekali. [sebetulnya] sudah daftar bansos pemerintah cuman tidak ada bantuan yang diterima.”

Kabupaten Bogor, 28 Agustus 2020

- **Bantuan terhenti (20%)**

Berbeda dengan sebelumnya, warga yang selama ini terdata dengan pasti dan mendapatkan bantuan secara rutin tiba-tiba pada bulan/periode tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Akibatnya, warga mesti mencari pengganti komposisi bantuan tersebut dengan nilai yang serupa agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya di tengah suasana pelik dengan kondisi tren PHK, sulitnya mencari pekerjaan, dan pembatasan sosial. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

“Keluarga saya hanya mendapatkan bansos 600 ribu selama 3 bulan, setelah 3 bulan itu keluarga saya tidak pernah mendapatkan bansos sama sekali”

Kabupaten Banjarnegara, 07 Desember 2020

3. Kurang Informasi (13%)

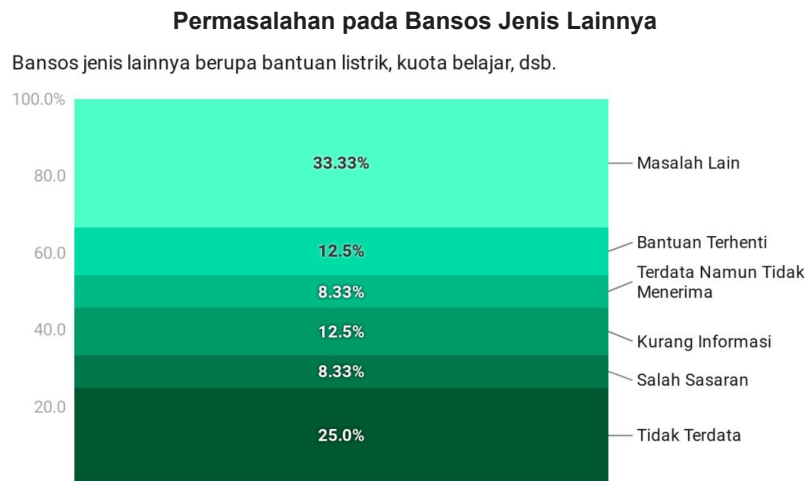
Kami juga menerima aduan mengenai ketiadaan penyebaran informasi yang menyeluruh membuat warga kebingungan mengenai program BLT Dana Desa ini. Kondisi warga desa yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi salah satu faktor warga sulit mendapatkan informasi yang berbeda-beda tergantung dari masing masing jenis bantuan sosial. Berikut merupakan contoh laporan yang masuk :

“Penyaluran bantuan sosial tunai yang dibagikan 600rb setiap bulan banyak salah sasaran. Kebanyakan hanya orang yang dikenal perangkat daerah. Seakan-akan yang dapat bantuan itu butuh orang dalam. Ada orang yg lebih kaya dari pada kami tapi mendapatkan bantuan. Mungkin bisa diusut kembali”

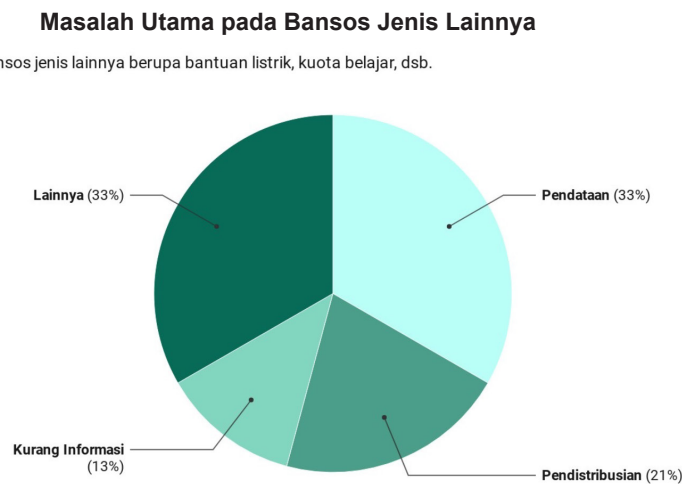
Kota Pekanbaru, 08 Desember 2020

5. BANTUAN SOSIAL JENIS LAINNYA

Penyelenggaraan program Jaring Pengaman Sosial tidak hanya meliputi bantuan dana dan sembako. Pemerintah juga menyediakan bantuan lain dalam bentuk bantuan listrik, kuota belajar, dan bantuan lain. Akan tetapi, bantuan-bantuan ini juga menunjukkan beberapa persoalan.



Source: LaporCovid-19



Source: LaporCovid-19

Laporan masuk kepada chatbot Lapor Covid 19 menunjukkan bahwa pendataan dan pendistribusian menjadi masalah utama. Pendataan terepresentasi sebesar 33% dari seluruh laporan masuk, sedangkan pendistribusian sebesar 21%. Sedangkan yang lainnya adalah persoalan kurang informasi, dan masalah lain yang berhubungan dengan program bansos jenis lainnya.

"Saya sebagai pelaku seni, ingin mengajukan dana bantuan ke <https://apb.kemdikbud.go.id> namun NIK saya tidak terdaftar"

Sleman, 6 Desember 2020.

“Saya ingin mengeluhkan layanan BANSOS yang mana belum merata. Saya mengetahui bahwa Kemendikbud mengadakan BANSOS untuk guru honorer dan tenaga perpustakaan. Akan tetapi saya sebagai tenaga perpustakaan di universitas swasta di Jakarta tidak tercatat dan tidak mendapat bantuan tersebut. Sejak dari awal adanya BANSOS Covid ini saya belum merasakan bantuan apapun. Bahkan bantuan dari BPJS, pra kerja, dan bantuan lainnya. Saya sangat kecewa dengan ketidakadilan ini karena saya pun terkena dampak dari pandemi Covid ini. Melihat orang lain bisa dengan mudah mendapat bantuan (padahal termasuk cukup), melihat pejabat dengan bebas korupsi dana BANSOS. Saya berharap dengan laporan ini, pemerintah tahu bahwa ada rakyatnya yang masih membutuhkan bantuan. Terima kasih”

Jakarta Pusat, 8 Desember 2020

BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

A. BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)

Covid-19 juga berdampak terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan stimulus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 6 tahun 2020, pemerintah menyalurkan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang kemudian disingkat sebagai BPUM ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai yang dikirimkan ke rekening penerima. Penerima BPUM ini adalah para pelaku usaha yang namanya diusulkan oleh lembaga pengusul. Penerima bantuan ini mendapatkan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- yang diterima satu kali.

Sejak ditetapkan pada 12 Agustus 2020, BPUM pertama kali dicairkan pada bulan Oktober 2020. Sekalipun memiliki dasar hukum dalam proses pelaksanaannya, BPUM tidak memiliki landasan kuat dalam hal pengawasan dan evaluasi. Oleh sebab itu kami menyadari adanya potensi permasalahan-permasalahan yang muncul selama penyaluran BPUM ini.

LaporCovid19 melalui layanan chatbot menerima beberapa keluhan perihal BPUM yang terjadi di masyarakat. Laporan ini menjadi lebih komprehensif dengan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia kepada masyarakat perihal BPUM. Kerjasama antara LaporCovid19 dan TII dilakukan dalam bingkai pengawasan terhadap BPUM yang nyatanya celah ini tidak diisi oleh peran pemerintah.

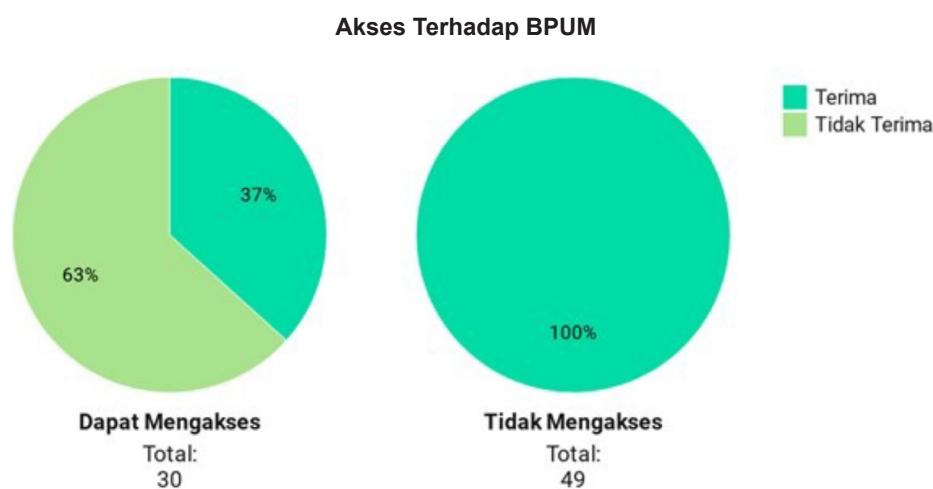
B. TEMUAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Program BPUM telah berjalan sejak bulan ditetapkan pada bulan Agustus. Tetapi, survei yang dilakukan TII menunjukkan bahwa akses terhadap program ini masih kurang.

Survei ini diisi oleh 79 orang dari seluruh Indonesia. Temuan dari survei tersebut menunjukkan

bahwa 49,4% responden dapat mengakses informasi BPUM. Sedangkan 50,6% responden menjawab belum bisa mengakses BPUM yang dilakukan oleh pemerintah. Responden yang telah mengakses pada umumnya menerima informasi dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, aparat kelurahan dan desa, dan juga melalui pengurus RT/RT. Informasi terkait BPUM juga didapat masyarakat dari pihak non pemerintah, seperti Media massa cetak dan online, media sosial, dan juga NGO.

Temuan selanjutnya adalah, dari 30 orang yang dapat mengakses BPUM, hanya 11 orang yang menjadi penerima BPUM. 19 orang yang menyatakan mereka tidak lolos seleksi dalam program BPUM. Sekalipun demikian, dari 30 orang yang telah mengakses BPUM, 14 orang masih menyatakan tidak ada pemberitahuan terkait perkembangan status pendaftaran dan pengusulan. Ini artinya, proses pelacakan dalam BPUM masih perlu ditingkatkan lagi.



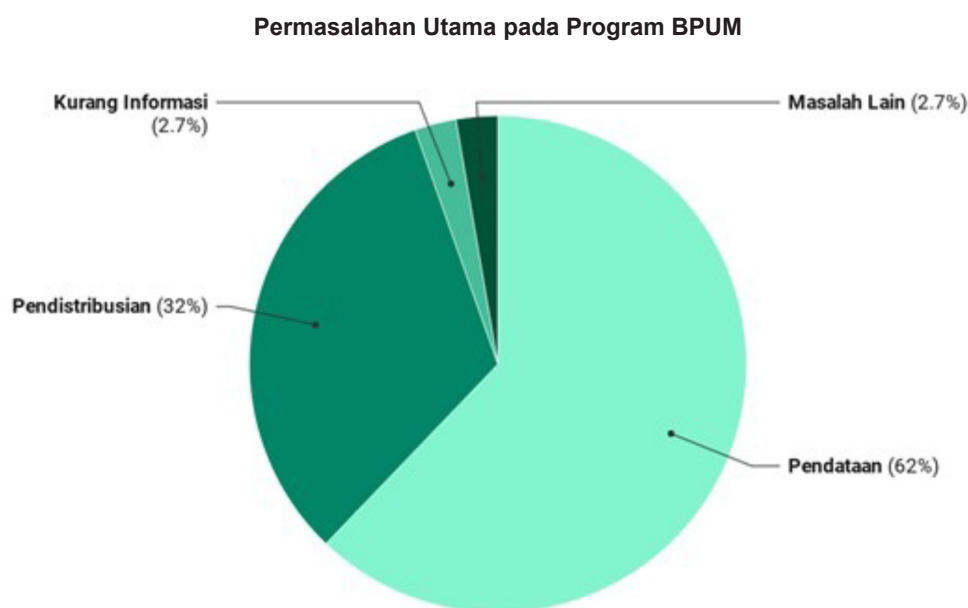
Source: LaporCovid-19

Temuan terakhir pada program BPUM ini adalah masih ada pelaku usaha mikro yang tidak menerima uangnya secara penuh. Masyarakat masih ada yang memberikan uang dengan jumlah tertentu atau uang dipotong oleh pihak penyalur.

C. TEMUAN LAPORCOVID-19

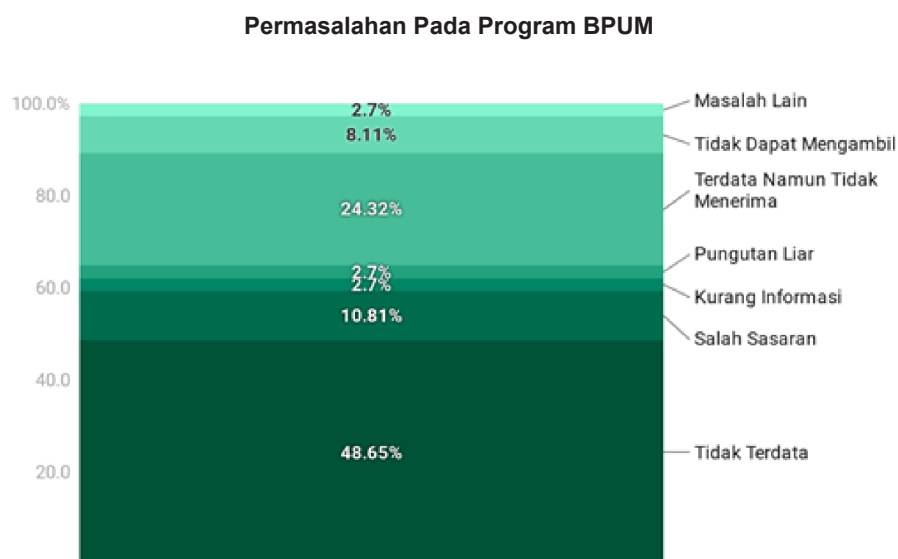
Sejak program BPUM mulai berjalan sampai bulan Februari 2021, LaporCovid-19 menerima 39 keluhan terkait BPUM.

Keluhan paling banyak dalam program BPUM ini adalah perihal pendataan, yakni sebesar 62% dan pendistribusian sebesar 32%,



Source: LapoCovid-19

Persoalan pendataan dan pendistribusian menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan BPUM ini belum maksimal. Sehingga temuan dari TII menjadi relevan, dimana kurang aksesibilitas dan regulasi terhadap pengawasan menimbulkan persoalan-persoalan pendataan dan pendistribusian.



Source: LapoCovid-19

Masalah-masalah yang terjadi dalam program BPUM akan dijelaskan sebagai berikut.

A. PENDATAAN

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu program. Saat proses pendataan tidak berjalan dengan baik, program yang dilaksanakan pun akan berjalan tidak maksimal. Selain

berimplikasi pada salah sasaran, kesalahan pada pendataan juga memunculkan celah-celah korupsi.

Pada program BPUM, Lapor Covid 19 telah menemukan beberapa persoalan pendataan lain:

1. Tidak Terdata

Tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 telah menyebabkan para pelaku ekonomi mikro harus menanggung beban ganda, yakni mempertahankan usahanya dan mempertahankan kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, adanya program BPUM ini dianggap sangat penting untuk menjamin kehidupan mereka. Akan tetapi, terbatasnya akses terhadap program ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program ini. Pada umumnya, masyarakat mengetahui ada program ini setelah pencairan BPUM gelombang I.

“Saya pelaku umkm (olshop baju anak). Namun tidak pernah terdata sebagai penerima. Malahan tetangga yang tidak memiliki usaha terdata sebagai penerima. Bahkan dalam 1 rumah (suami-istri) semua mendapatkan. Jadi cari 4.800.000 dalam 1kk. Sedangkan kami yang benar2 memiliki usaha, tidak tersentuh bantuan apapun.”

Kulon Progo, 6 Desember 2020

2. Salah sasaran

Masalah kedua akibat tiadanya verifikasi ketat terhadap pendataan penerima BPUM adalah bantuan yang salah sasaran. Keadaan tentunya memperparah keadaan ekonomi masyarakat yang terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Warga yang memiliki usaha kecil pada akhirnya tidak mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang memiliki usaha yang cukup mapan dan tak terdampak signifikan justru mendapatkan BPUM.

“Ayah saya adalah seorang pedagang kecil-kecilan. Beliau Single parent. Ibu saya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Saat pandemi covid-19 ini beliau tidak bekerja. Ayah saya butuh bantuan dana untuk memulai usahanya. Apalagi kami sekeluarga harus mencukupi keperluan sehari-hari, awalnya memang ayah saya di data untuk pengajuan penerima UMKM. Ayah saya menunggu dan berharap bantuan tersebut segera terealisasi. Nyatanya, pedagang lain yang lebih mampu dan lebih baik dari segi ekonomi malah sudah terealisasi bantuannya sejak dulu. Tolong pak, Di daerah sini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Terimakasih.”

Trenggalek, 8 Desember 2020

3. Pungutan Liar

Laporan yang masuk di chatbot Lapor Covid 19 juga menunjukkan adanya praktik pungli pada proses pendataan BPUM. Oknum pungli ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum pada level terbawah dengan memanfaatkan kurangnya informasi dan akses terhadap BPUM.

“Selamat pagi, saya ingin menyampaikan bahwa di RT rumah saya apabila ingin mendapatkan bantuan BANSOS harus membayar sejumlah uang, dan apabila tidak maka akan dipersulit untuk mendapatkan BANSOS tersebut oleh pihak RT dan itu terjadi sejak awal BANSOS disalurkan.”

Jakarta Timur, 7 Desember 2020

B. PENDISTRIBUSIAN

Proses pendistribusian BPUM juga menunjukkan adanya masalah. Masalah distribusi merepresentasikan 32% masalah yang terjadi di program BPUM. Secara umum, persoalan distribusi meliputi bantuan yang tidak kunjung diterima oleh penerima bantuan dan bantuan tidak dapat diambil karena ada mekanisme rumit pasca pendataan.

1. Terdata namun tidak menerima

Pada dasarnya, setelah data penerima terverifikasi oleh lembaga pengusul, penerima bantuan hanya perlu menunggu bantuan untuk datang. Akan tetapi, kenyataannya, masih banyak penerima masyarakat yang tak kunjung menerima BPUM. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme BPUM masih belum tereksekusi secara baik oleh para lembaga pengusul atau lembaga penyalur.

Saya sebagai anggota PNM (mekar) wilayah desa Sukodono, Sidoarjo, Jawa timur. Ada 6 anggota kami yang belum mendapatkan bansos tersebut sampai saat ini. Mohon diperiksa apakah memang ada keterlambatan pencairan bansos tersebut karena beritanya uang tersebut sudah harus dicairkan semua bulan November 2020. mohon diperiksa dan kami menunggu jawabannya. Terimakasih.

Sidoarjo, 4 Desember 2020

2. Tidak dapat mengambil

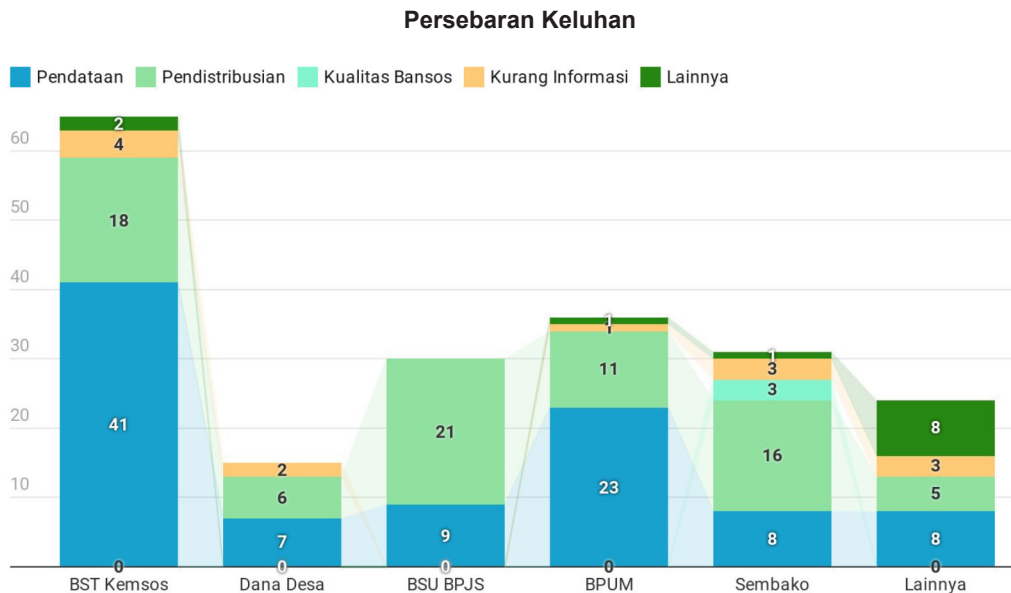
Dana yang tidak dapat diambil juga menjadi salah satu jenis keluhan pada program BPUM. Tata cara yang tidak dijelaskan oleh penyelenggara menyebabkan banyak warga tidak tahu bagaimana cara pengambilan bantuan tersebut. Akibatnya, ada warga yang harus menunggu lama

“Dana sudah ada di rekening saya dari akhir september, tetapi sampai bulan ini dana tersebut tidak bisa saya ambil.”

Kota Depok, 6 Desember 2020

KESIMPULAN

Rekapan/ Kesimpulan keluhan bansos dari seluruh laporan yang masuk:



Source: LaporCovid-19

Berdasarkan kategori keluhan bantuan sosial, hampir sebagian besar atau 96 laporan yang masuk mengeluhkan soal pendataan yang tidak transparan dan akuntabel. Menyusul berikutnya adalah persoalan distribusi yang tidak merata dengan 77 laporan. Diikuti dengan kurangnya informasi dan juga sosialisasi mengenai bantuan sosial dengan 13 laporan dan juga kualitas daripada bantuan sosial itu sendiri serta keluhan lainnya.

PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TIDAK MERATA

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa pendataan dalam bantuan sosial menjadi momok yang cukup memprihatinkan. Kurangnya kelengkapan data menyebabkan bantuan sosial tidak dapat disalurkan. Di samping itu, pemerintah daerah juga dirasa belum cukup aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data sehingga masih didapati data KPM ganda, atau data NIK invalid / tidak valid, pindah domisili, dan juga kelompok marginal ekonomi lain seperti gelandangan, pengemis, warga jalanan yang tidak memiliki identitas KTP.

“Saya tidak menerima data bantuan covid sama sekali, saya sudah mengisi data bantuan UMKM tidak lolos, sembako tidak ada pendataan, bantuan sosial tunai tidak dapat dan tidak ada pendataan, bantuan listrik tidak ada, bantuan sosial jenis lainnya tidak dapat juga”

Purwokerto, 17 Desember 2020

“Sejak bulan Agustus, pihak RT sudah meminta data diri KK dan KTP untuk para penerima bansos di desa kami. Katanya akan menerima bansos uang tunai 600rb. Akan tetapi sampai sekarang belum juga tersalurkan dan juga untuk pendataan penerima bansos sembako di tempat tinggal saya juga tidak tepat sasaran.”

Kabupaten Madiun, 04 Desember 2020

PENYALURAN TIDAK TERATUR/ PENYALURAN TERHENTI

Sebelum maupun selama pandemi berlangsung, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat. Namun, buruknya tata kelola dalam proses distribusi bantuan sosial memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakat. Kegamangan warga ketika penyaluran bantuan sosial yang tiba-tiba terhenti tanpa adanya penyebab yang jelas, menimbulkan kecemasan tersendiri bagi mereka yang kerap kali menggantungkan hidupnya dari pemberian bantuan sosial tersebut terutama dikala krisis ekonomi melanda masyarakat tingkat bawah.

“Apakah saya [masih] termasuk kedalam penerima bantuan? Karena pada periode kedua ini saya tidak mendapatkan bantuan sosial, berbeda dengan sebelumnya pada periode pertama”

Kota Bandung, 10 Desember 2020

“Saya ingin melaporkan Bude saya yang tinggal seorang diri tanpa suami dan anak. Selama masa pandemi ini, Bude saya hanya mendapat satu atau dua kali saja di bulan bulan awal pandemi. Sampai sekarang tidak ada lagi. Mohon klarifikasi dari pihak terkait dalam pendistribusian bantuan sosial, khususnya di daerah Tangerang kota”

Kota Tangerang, 06 Desember 2020

KURANGNYA INFORMASI DAN SOSIALISASI

Selain persoalan pendataan dan distribusi, kami juga melihat ketiadaan akses informasi terhadap masyarakat berimplikasi pada minimnya pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial itu sendiri. Padahal, keterbukaan informasi mengenai bantuan sosial mencerminkan transparansi dan akuntabilitas negara dalam hal ini penyelenggara bantuan sosial. Meski pemberian bantuan sosial sudah berlangsung sebelum adanya pandemi, justru pada kondisi krisis seperti ini banyak masyarakat yang cukup mengharapkan kehadiran bantuan sosial namun mereka memiliki keterbatasan dalam ruang informasi dan teknologi.

“Tidak dapat informasi tentang kapan dan bagaimana mendaftar untuk mendapatkan bansos, dan juga tidak disosialisasikan [mengenai informasi tersebut] di Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan”

Kota Banjarmasin, 06 Desember 2020

“Informasi mengenai bantuan modal UMKM dari desa tidak tersiar sampai masyarakat, akibatnya banyak yang seharusnya menerima jadi tidak terdata, yang terdata hanya kerabat pemerintah desa, masyarakat lain yang baru mengetahui sudah tidak bisa mendaftarkan”

Banjarnegara, 07 Desember 2020

“Halo, saya tinggal di jl. Bayem makmur Kelurahan : gandaria utara Kecamatan : kebayoran baru Jakarta selatan. Didaerah saya, kami rutin mendapatkan bansos dari bulan pertama pendistribusian s.d saat ini, namun sayang sekali semakin lama kualitas bansos sepertinya sudah bukan hal utama lagi, karena di bulan ke 3 kami menerima kualitas beras raskin (sudah menguning), dan 2 bulan terakhir ini terparah. Kami menerima beras yg sudah berkutu” sangat banyak sekali, sehingga beras rusak dan tidak layak + tidak bisa digunakan. Semoga menjadi perhatian, agar langkah baik ini tidak menimbulkan “mubazir” dikemudian hari, karena bantuan sembako yg diberikan sudah tidak layak, terutama beras”

Jakarta Selatan, 18 November 2020

PRAKTIK KKN

Dampak lain ketidakhadiran pemerintah dalam verifikasi dan validasi data ini, berpotensi diselewengkan oleh kelompok/oknum nakal pada praktik pungli dan juga diskriminasi kepada kelompok tertentu. Sialnya, kondisi ini diperparah dengan minimnya informasi dan transparansi pada distribusi bantuan sosial menjadi celah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

“Saya ingin menyampaikan mengapa bantuan [BST] Covid untuk rakyat tidak mampu, justru diberikan kepada kerabat perangkat daerah atau perangkat desa saja. Tolong ditindaklanjuti. Banyak sekali di setiap desa yang mengalami hal seperti ini yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan hak nya begitu juga sebaliknya Tolong ditindaklanjuti dengan tegas untuk perangkat desa dan daerahnya juga”

Kota Jakarta Utara, 11 Desember 2020

“Saya dari Pekanbaru, Riau. Penyaluran bantuan sosial tunai yang dibagikan 600rb setiap bulan banyak salah sasaran. Kebanyakan hanya orang2 yang dikenal perangkat daerah. Seakan untuk dapat bantuan saja butuh orang dalam. Ada orang yg lebih kaya dari pada kami tapi mendapatkan bantuan. Mungkin bisa diusut kembali”

Pekanbaru, 8 Desember 2020

REKAPAN RESPON PEMERINTAH DALAM MENANGGAPI LAPORAN WARGA:

Respon dari masing-masing K/L:

- Jaga Bansos KPK - Laporan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial sudah diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Jaga Bansos KPK. Selain itu,

platform LaporCovid-19 sudah diintegrasikan dengan Jaga Bansos KPK untuk terus mengirimkan laporan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak kunjung didapatkan karena beberapa alasan.

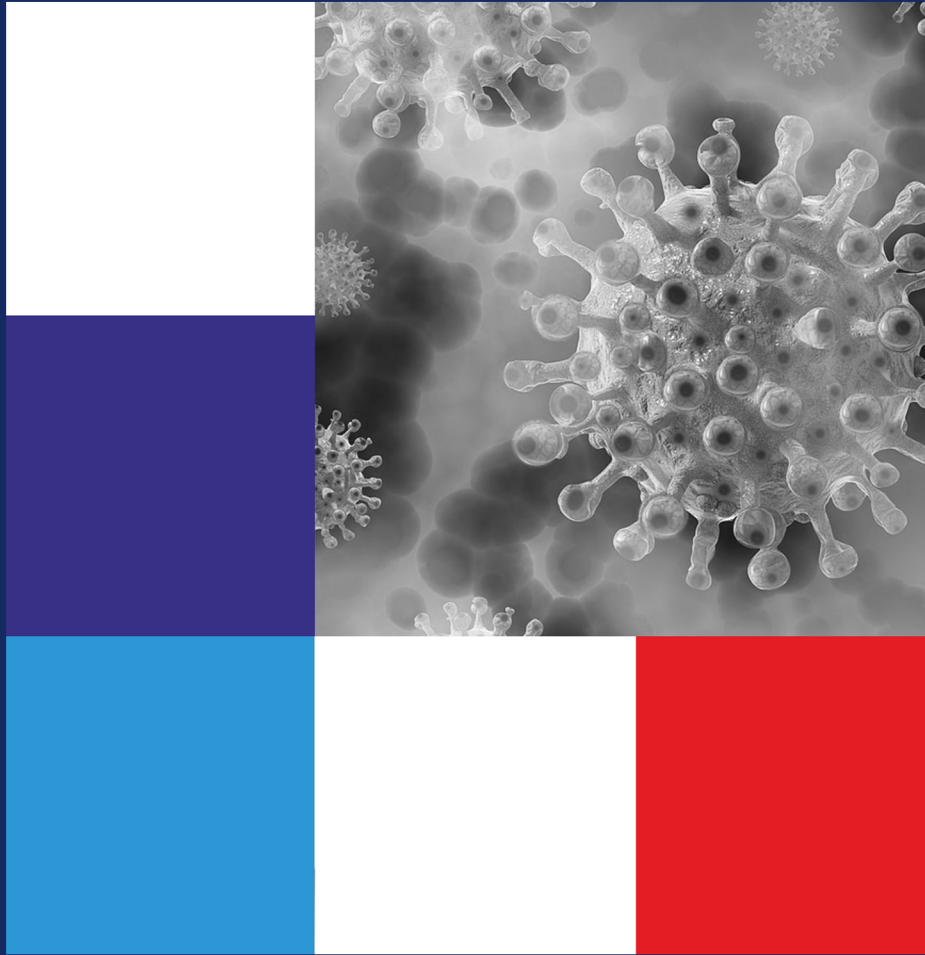
- Kementerian Tenaga Kerja tidak merespon aduan dari warga terkait dengan pendataan dan penyaluran BSU BPJS.
- Beberapa laporan warga juga kami teruskan kepada dinas sosial terkait.
- Beberapa praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi K/L pelaksana bantuan sosial:
 - DKI Jakarta melalui kanal aduan JAKI di mana laporan bantuan sosial juga diteruskan kepada suku dinas terkait dan ditindaklanjuti
 - Dinas Sosial Sleman memberikan bukti proses tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas, di dalamnya tertulis langkah-langkah detail yang dilakukan untuk memastikan laporan tidak fiktif dan langkah berikutnya yang akan diambil oleh pihak dinsos untuk memastikan warga mengadu mendapatkan bantuan sosial
- Namun, kami juga banyak mendapatkan tanggapan dari dinas sosial yang justru menugaskan pelapor untuk melapor kepada tingkat daerah terkecil, yaitu pihak RT/RW tanpa diberikan petunjuk lebih, seperti memberikan kontak RT/RW terkait atau langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh oleh warga.

REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu melakukan perbaikan pada tata kelola pendataan bantuan sosial. Banyaknya warga yang mengeluhkan bahwa dirinya tidak terdata oleh pihak pengusul dan proses pendataan yang tidak transparan (pihak pengusul tidak melakukan verifikasi lapangan dan validasi data) membuat warga tidak mendapatkan hak dan negara tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Sehingga, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan di tingkat daerah sebagai pengusul penerima manfaat.
2. Proses pendataan yang kacau membuat banyak bantuan sosial yang salah sasaran. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat mekanisme pengembalian dana bagi penerima yang salah sasaran.
3. Informasi yang beredar mengenai bantuan sosial yang tersedia untuk masyarakat terdampak Covid-19 hanya berupa infografis yang tidak menjelaskan terkait penyaluran bansos dan proses pendataan. Pemerintah perlu membuat informasi yang lebih detail, seperti proses pengambilan bansos dan waktu batas penyaluran untuk masing-masing bantuan sosial sehingga warga mengetahui kapan bantuan tersebut dapat diterima. Informasi tersebut perlu diperbarui secara realtime
4. Memastikan semua kebijakan, informasi, dan mekanisme distribusi bantuan sosial tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Laporan warga yang masuk menunjukkan ketidaktahuan akan informasi dan keluhan distribusi bantuan sosial.

Karenanya, pemerintah perlu mengintegrasikan jenis bantuan sosial menjadi bantuan sosial universal (satu nama) yang menyederhanakan proses administrasi dalam pemberian bantuan sosial sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengidentifikasi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

5. Mekanisme distribusi bantuan sosial dapat dilakukan menggunakan media kartu yang berisikan saldo atau dalam bentuk uang tunai secara langsung, sehingga masyarakat dapat menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nantinya, proses pembelanjaan dapat dilakukan pada E-Warong (agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemensos) sehingga Kementerian Sosial dapat melakukan pengawasan terhadap barang-barang apa saja yang hanya dapat dibelanjakan menggunakan dana bantuan sosial.
6. Pemerintah harus memperkuat kanal pengaduan. Masyarakat ragu untuk melapor kepada pemerintah karena proses birokrasi yang lama dan rentannya perlindungan terhadap pelapor. Pada kondisi eksepsi, secara khusus kondisi krisis akibat bencana, pemerintah harus sigap dan tanggap terhadap laporan warga. Selain itu kanal lapor.go.id harus lebih dimaksimalkan. Beberapa kali kami mencoba melapor melalui lapor.go.id sama sekali tidak ada tanggapan.



Buku ini membahas tentang pelaksanaan program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, pelaksanaan program ini terdapat berbagai masalah seperti pendataan yang tidak akurat, penerima bantuan fiktif, kualitas bantuan yang tidak sesuai, politisasi bantuan sosial, dan praktik pungli. Selain itu, layanan laporan warga LaporCovid-19 juga menerima banyak laporan terkait masalah bantuan sosial. Oleh karena itu, buku ini juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan transparan dalam pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

ISBN:

Redaksi:

Bona Indah Plaza A2-B11, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus,
Jakarta Selatan 12440

Email: sekretariat@laporcovid19.org